

MORAL EKONOMI KAUM SANTRI



Abdul Mun'im DZ
Ketua Lajnah
Ta'lif Wan Nasysr (LTN) NU

Persoalan ekonomi menjadi program penting dalam organisasi NU sejak awal berdiri, yang kemudian dirumuskan dalam *Mabadi Khoiro Ummah* dalam Mukhtamar NU ke-13 di Magelang 1939 sebagai landasan moral bagi gerakan ekonomi kaum santri, khususnya kaum *Nahdliyin*. Karena itu walaupun bidang ekonomi yang disasar, tetapi rumusan itu merupakan gugusan nilai moral yang seolah tidak ada hubungannya secara langsung dengan aktivitas ekonomi. Tidak jarang membuat orang saat ini kecewa melihat rumusan tersebut yang dianggap tidak bersangkutan paut dengan pengembangan ekonomi, melainkan khutbah akhlak. Memang kalau konsep ini tidak dilihat konteks-

nya akan kehilangan makna dan daya guna bagi pengembangan masyarakat, khususnya pengembangan ekonomi. Apalagi ketika ekonomi modern yang digerakkan berdasarkan *free fight competition* (persaingan bebas) dengan prinsip nihilisme moral, ekonomi telah dipisahkan dari nilai-nilai etis, sehingga doktrin moral sebagaimana dirumuskan dalam *mabadi* semacam itu semakin sulit dipahami.

Pada mulanya ilmu ekonomi adalah pengetahuan tentang moral ekonomi, apa yang dirumuskan oleh bapak ilmu ekonomi Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* adalah sebuah traktat tentang etika ekonomi. Demikian juga apa yang dirumuskan Karl Marx dalam beberapa tulisannya termasuk *Das Kapital* adalah sebagai risalah tentang ekonomi politik yang sebenarnya juga merupakan sebuah rumusan tentang etika ekonomi. Ini tidak berarti moral ekonomi itu mendahului perkembangan ekonomi, malah sebaliknya, moral dan teori ekonomi itu mengiringi atau menjelaskan perkembangan ekonomi yang terjadi.

Dengan rumusan itu sebenarnya hendak menjelaskan beberapa realitas, mengapa orang saling bekerjasama mencari keuntungan bersama, tetapi di sisi lain juga kenapa orang yang saling

menghisap satu sama lain. Dari situlah moral ekonomi dan politik ekonomi dirumuskan, kemudian teori ekonomi itu dikembangkan.

Watak Kewirausahaan Kaum Santri

Sektor perdagangan bagi kaum santri bukanlah sektor baru, melainkan memiliki sejarah panjang, sepanjang hadirnya Islam di Indonesia sendiri yang pada mulanya dibawa oleh para pedagang baik dari Gujarat maupun dari Arab dan yang pertama kali memeluk Islam juga kalangan pedagang yang ada di pusat perdagangan di berbagai kota pelabuhan. Mobilitas para pedagang itu memungkinkan Islam cepat menyebar. Hampir seluruh kota perdagangan penting dikuasai golongan santri. Apalagi setelah jatuhnya Majapahit dan lahirnya berbagai kerajaan Islam mulai dari Demak, Pajang, Mataram, Giri, serta beberapa pusat perdagangan lain seperti Semarang, Lasem, Tuban, Jepara, Gresik, Palembang, Banjarmasin, Maluku. Hampir seluruh sektor perdagangan dikuasai oleh para saudagar Muslim.

Baru setelah datangnya kolonialisme Eropa baik Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris, yang mengenal dan menerapkan sistem monopoli pada dunia, maka perdagangan muslim berangsur surut. Pada mulanya mereka hanya mengejar rempah-rempah, tetapi kekayaan Nusantara lebih dari itu, maka sektor lain, mulai dari beras, minyak, gula juga mulai dieksploitasi oleh pedagang Eropa. Tersingkirnya perniagaan Muslim ini bukan sekadar monopoli,

tetapi juga karena desakan militer Eropa yang menjadi penopang sistem ekonomi mereka, yakni ekonomi bersenjata VOC, baik milik Belanda, Inggris atau Portugis melakukan hal yang sama.

Sistem monopoli yang diterapkan Kolonial Eropa dijalankan melalui cara berantai yakni menggunakan sistem rasial. Sektor ekspor impor didominasi ras Eropa, sementara perdagangan antar pulau diserahkan kepada mitra Timur Asing mereka yaitu Arab, Cina dan India. Sementara kalangan pribumi yang jumlahnya mayoritas hanya boleh mengurus perdagangan antar kota, dan itupun hanya sektor-sektor kecil. Usaha besar masih tetap dimonopoli Eropa dan Timur Asing rekanan mereka. Kalangan pribumi sengaja digencet agar mereka tidak bangkit, secara budaya dan politik. Sebab bila mereka bangkit akan berbahaya terhadap keamanan penjajahan. Karena itu mereka hanya memberikan jatah pada kelompok minoritas asing yang tidak mungkin memberontak, apalagi mereka diberi berbagai macam fasilitas.

Di bawah tekanan kolonial itulah perekonomian kaum santri berkembang, walaupun tidak dalam skala besar, tetapi mampu menghidupi keluarga, pesantren dan organisasi atau paguyuban yang mereka selenggarakan. Tekanan dan pembatasan yang terus-menerus itu membuat ekonomi kaum santri berjalan lambat, bahkan semakin tertinggal dengan kelompok lain terutama yang bekerjasama dengan Belanda atau Timur Asing, itupun hanya sedikit jumlahnya.

Di lain pihak, berbagai tekanan itu membuat kaum santri tumbuh sebagai saudagar yang ulet. Dengan sikapnya yang non kooperatif dengan penjajah Belanda, kalangan santri membekali diri dengan modal finansial yang kuat untuk mendukung aktivitas sosial mereka, agar mereka menjadi organisasi yang mandiri. Kemandirian ekonomi semacam itu yang akan memperkuat posisi politik mereka.

Demikian pula dalam konteks perkembangan ekonomi kaum santri, pada dasarnya sejak awal, selain berprofesi sebagai petani, kebanyakan kaum santri adalah saudagar. Islam sendiri datang ke Nusantara dibawakan oleh para wali dan ulama yang tidak dibiayai oleh siapapun, sehingga mereka harus mendanai perjalanan dakwahnya itu dari Timur Tengah dan Asia Selatan dengan biaya sendiri, dari situlah mereka berdagang. Perdagangan mereka yang tidak hanya bertaraf subsistem, hanya untuk mencukupi kebutuhan dakwah, banyak di antara mereka yang benar-benar menjadi saudagar besar, yang menguasai berbagai bidang perniagaan.

Dengan statusnya sebagai saudagar besar itulah mereka bisa mendapatkan pintu masuk ke istana, karena memang perdagangan yang mereka bawa tidak sedikit yang terdiri dari barang-barang mewah seperti keramik, permadani, intan, berlian dan minyak wangi, sehingga hanya kalangan bangsawan yang mampu membeli. Dengan kenyataan itu saya berpendapat bahwa sektor perdagangan itulah yang membuka akses bagi dakwah Islamiyah mereka, sehingga tidak hanya

mengorek dari masyarakat pinggiran, tetapi langsung bisa menusuk ke jantung Istana. Kadang orang sering salah memahami status saudagar ini, yang dianggap menyiarkan hanya sambilan. Tidak begitu, malah saya berpendapat bahwa mereka mubalig yang tangguh yang menyiarkan Islam secara serius, sementara berdagang sebagai amunisi dan sekaligus sebagai strategi untuk memperoleh pintu masuk ke kelas atas.

Ekonomi sebagai Basis Gerakan

Dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap pendidikan yang lebih maju dan mendirikan organisasi yang lebih modern, maka kalangan pimpinan Islam berusaha menggalakkan usaha ekonomi mereka, tidak hanya sektor pertanian dan kerajinan, tetapi terutama di bidang perdagangan. Selama mereka hanya menjadi produsen, keuntungan yang mereka peroleh hanya sedikit, karena keuntungan besar diambil oleh pedagang perantara. Karena itu kemudian mereka berusaha memangkas jalur distribusi dengan memasarkan langsung ke konsumen atau ke pedagang eceran. Hal itu yang dilakukan oleh kelompok Islam di Solo saat mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1911 dan juga kelompok kiai pesantren di Surabaya saat mendirikan *Nahdlatut Tujjar* tahun 1918.

Ini menunjukkan bahwa sebenarnya aktifitas ekonomi itu sudah berkembang sedemikian rupa di kalangan masyarakat santri, tidak hanya dalam sektor ekonomi pertanian, tetapi mulai merambah ke

sektor bisnis. Para ulama yang terlebih dulu mendirikan Nahdlatut Tujjar (gerakan kaum sudagar) bertempat tinggal di berbagai kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerta, Jombang dan Kediri.¹

Perlu diketahui Surabaya saat itu merupakan kota yang tidak hanya terbesar di Indonesia, tetapi terbesar di Asia. Waktu itu Tokyo belum apa-apa. Kyoto walaupun sudah maju, tetapi belum sebanding dengan Surabaya (selain kota Bandar, juga kota niaga dan industri serta kota minyak). Perlu diingat penerapan mesin uap yang merupakan tanda dari revolusi Industri itu pertama kali dilakukan di Surabaya.

Kenyataan ini bisa menjelaskan bahwa dinamika ekonomi kota ini sangat deras, di mana kaum santri yang ada di kawasan kota niaga dan industri telah terlibat dalam aktifitas dagang yang sama. Daerah Pabean Ngampel pusat perdagangan di Surabaya saat itu dikuasai kaum santri baik yang Arab maupun pribumi. Para kiai pesantren seperti K.H. Wahab Chasbullah, K.H. Ridwan dan KH. Hasyim Asy'ari sendiri memiliki hubungan erat dengan para pelaku ekonomi baik kalangan pribumi, Arab maupun Cina di pusat perdagangan itu. K.H. Hasyim Asy'ari sendiri selain berdagang ternak di pasar hewan Tunggorono, juga berdagang minyak nilam, serta

kain.² Demikian K.H. Wahid Hasyim juga menekuni usaha bisnis tekstil.

Pada umumnya para pengurus NU memiliki perusahaan, baik atas nama lembaga atau pribadi yang mendapatkan kredit dari Bank Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mereka bonafid, bahkan K.H. Wahab Chasbullah memiliki perusahaan CV Koernia³ yang bergerak di berbagai jenis usaha, seperti impor sepeda, distribusi beras dan usaha pelayaran. Setelah Indonesia merdeka, para tokoh NU telah menguasai berbagai bidang bisnis. K.H. Ahmad Syaichu misalnya adalah seorang pengusaha sepatu di Surabaya.

Bisnis yang dikembangkan ini dengan sendirinya selain melibatkan para importir dan eksportir besar juga melibatkan sekian banyak kaum santri, baik sebagai distributor ataupun suplayer. Jaringan keulamaan sebenarnya ditopang oleh jaringan ekonomi yang mereka kembangkan.

Dengan demikian, jaringan tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar menghadapi monopoli Kolonial. Ketika Nahdlatut Tujjar dilebur ke dalam NU bukan berarti naluri dagang para ulama itu surut. Mereka justru harus lebih keras berdagang karena berorganisasi membutuhkan banyak biaya untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk turun ke berbagai daerah, yang kese-

¹ Lihat Deklarasi *Nahdlatut Tujjar*, Surabaya, tt.

² KH Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, Gunung Agung Jakarta 1987, h. 296.

³ Subagijo IN. Jusuf Wibisono, *Karang di tengah Gelombang*, Gunung Agung, Jakarta, 1980, h.160-161. Secara sporadis buku ini banyak menyoroti aktivitas ekonomi NU.

muanya harus dibiayai sendiri. Tradisi ini diturunkan langsung ke pengurus NU di ranting paling bawah, sehingga tradisi berniaga di lingkungan kaum santri juga terus berkembang.

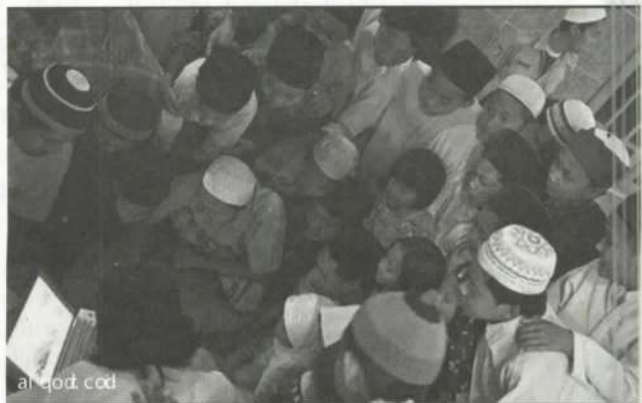
Soal ekonomi atau pencarian nafkah sebenarnya telah merupakan naluri, setiap orang yang normal pasti akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi mereka yang tidak bekerja sebagai priyai atau *ambtenaar* dengan sendirinya harus bekerja sebagai petani atau pedagang. Dalam perdagangan terjadi persaingan begitu ketat dan tidak jarang dengan cara kotor saling menipu, menambah atau mengurangi timbangan.

Dalam kondisi seperti itu, maka yang perlu dirumuskan oleh para ulama, bukan bagaimana menumbuhkan kewirausahaan di kalangan kaum santri, atau manajemen perusahaan buat mereka. Bukan karena di tengah tekanan Belanda, mereka tidak bisa masuk sektor birokrasi, baik karena alasan etis atau teknis. Belanda hanya memilih partner dagang mereka dari kelompok Eropa sendiri, selebihnya diberikan kepada mitra asing mereka atau yang sering disebut dengan istilah warga Timur Asing, yang terdiri dari orang Arab, Cina, India dan Jepang. Pilihan yang tepat bagi kaum santri adalah usaha sendiri sebagai pedagang atau petani. Maka yang mendesak untuk dirumuskan adalah etika bisnis atau moral bisnis, sebagai pegangan bagi para pelaku usaha di lingkungan NU dan umat Is-

lam pada umumnya, sebab mereka saling bekerjasama sehingga diharapkan tidak saling merugikan, sebaliknya diharapkan saling dapat dipercaya dengan prinsip *antarodlin*, sehingga bisa saling menguntungkan.

Pengembangan pendidikan Kolonial yang dimulai sejak Politik Etis dirasakan kalangan Islam sebagai usaha 'pembelandaan' orang-orang Indonesia, bahkan juga dianggap sebagai usaha pengkafiran orang-orang Islam. Oleh karena itu, kalangan santri berusaha keras memajukan pendidikan mereka, baik pendidikan pesantren maupun madrasah. Dengan demikian, desakan untuk melakukan pengembangan ekonomi sebagai sumber dana bagi pembangunan pesantren dan madrasah serta organisasi yang memperjuangkan dan membela Islam semakin mendesak untuk dikembangkan. Tujuan gerakan ekonomi adalah untuk menopang pelaksanaan pendidikan.

Selama ini jaringan Islam internasional yang dipandu oleh para ulama yang berpusat di Masjidil Haram Mekah cukup memberikan kemudahan bagi pengembangan keilmuan Islam, dan juga



pengembangan ekonomi ketika dunia Islam tenggelam dalam alam penjajahan. Tapi situasi berubah total ketika Mekah dan Madinah dikuasai oleh kelompok Wahabi, yang ekstrem yang tidak memiliki toleransi terhadap mazhab lain. Maka para ulama dari berbagai mazhab Ahlusunnah Waljamaah diusir dari tanah suci, sehingga mereka bercerai-berai. Para ulama Indonesia sangat peduli untuk mempertahankan posisi mereka di Masjidil Haram, termasuk keselamatan sejarah dan warisan Islam yang ada di sana, yang kesemuanya hendak dihancurkan oleh kelompok Wahabi yang didukung oleh kolonialisme Inggris.

Kalangan Ulama Sunni yang ada di Surabaya membentuk kepanitiaan untuk menyelamatkan Tanah Suci itu dengan mendirikan Komite Hijaz yang bertugas menyampaikan aspirasi ulama pesantren kepada raja Abdul Aziz Ibnu Saud. Keseluruhan biaya perjalanan para delegasi Komite Hijaz untuk pergi ke tanah suci dikumpulkan dari kaum saudagar santri yang ada di kota Surabaya. Para saudagar itulah yang kemudian juga menyokong berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Chabdullah, K.H. Ridwan, dan Bisri Sansoeri sendiri adalah anggota Nahdlatut Tujjar karena mereka juga pengusaha. Ketika mendirikan NU, mereka memberikan dana untuk membiayai berbagai pertemuan.

Kongres NU pertama dan kedua diselenggarakan di Surabaya 1926 dan 1927, ditempatkan di hotel dengan demikian butuh dana untuk sewa tempat.

Jauh sebelum muktamar diselenggarakan, penggalangan massa dari berbagai cabang yang ada dilakukan di Jawa, baru kemudian melebar ke seluruh Nusantara. Dengan sendirinya, ini juga bagian dari bentuk penggalangan dana.

Sebagai organisasi non kooperatif yang berdiri sendiri tanpa sokongan Kolonial, maka NU memusatkan usaha di bidang ekonomi sebagai penunjang kegiatan *jam'iyah*. Forum Kongres atau muktamar seringkali digunakan sebagai pertemuan antara jaringan para pedagang, sehingga dengan hadirnya NU, usaha mereka semakin maju ketika jaringan usaha semakin meluas antara pengusaha yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Jombang dengan pengusaha yang ada di Kudus, Jepara, Tasikmalaya, Garut, Banten dan di Banjarmasin, Palembang dan Makassar dan Mataram. Pertukaran perdagangan itu memungkinkan mereka mampu membiayai sendiri perjalanan ke tempat muktamar, bahkan mereka bisa secara rutin memberikan sumbangan pada panitia, baik berupa barang maupun uang.

Selain membangun dunia pendidikan dan organisasi modern yang membutuhkan adanya basis ekonomi yang memadai, pada dasawarsa 1930-an, NU juga memulai usaha baru di bidang penerbitan majalah, antara lain *Suara Nahdlatul Ulama*, *Berita Nahdlatul Ulama*, *Suara Ansor* dan lain sebagainya. Ini diperlukan karena cabang NU telah berdiri di seluruh Nusantara. Penerbitan berkala semacam itu mengandaimkan adanya sumberdaya ekonomi yang

memadai, baik dari segi produsen yang membutuhkan modal besar, juga kekuatan ekonomi dari segi konsumen, dari segi kemampuan atau daya beli pembaca.

Majalah tersebut juga didukung oleh para pengusaha NU yang tercermin dengan tampilnya berbagai iklan komersial yang menawarkan berbagai produk mulai dari usaha jahitan, penyediaan kain, rokok, makanan olahan hingga barang elektronik. Pada umumnya gerakan yang dirintis oleh K.H. Machfudz Shiddiq, K.H. Wahab Chasbullah dan K.H. Wahid Hasyim berlangsung cukup lama dan menjadi bacaan warga NU di seluruh Nusantara. Melalui majalah-majalah itulah warga NU yang terpecah dikomunikasikan dan dipersatukan melalui pikiran dan gagasan. Dengan demikian, ajaran Sunni bisa lebih disebarluaskan dan diperkuat melalui berbagai penerbitan ini. Sebab selama ini penerbitan banyak diisi oleh pihak Belanda atau kalangan Islam modernis yang berhaluan Wahabi, sehingga banyak merugikan posisi NU terutama dalam hal pemahaman keagamaan.

Dengan adanya penerbitan itu posisi NU setidaknya dapat dipertahankan dan menjadi pegangan para ulama dan warga Nahdliyin pada umumnya. Apalagi saat itu problem besar yang dihadapi intern umat Islam adalah adanya *khilafiyah* antara Islam modernis Wahabi dengan kelompok Islam Sunni pesantren. Kalangan modernis dengan berbagai media

melakukan berbagai serangan terhadap tradisi pesantren, sehingga meresahkan kalangan pesantren. Dengan hadirnya media alternatif bagi dunia pesantren yang dikembangkan oleh para pimpinan NU, kalangan pesantren mendapatkan argumen yang lebih kuat dalam menghadapi serangan dari kaum modernis di segala tingkatan. Dengan adanya kebutuhan dari pembaca seperti itu, maka penerbitan tersebut pada umumnya bertahan cukup lama karena ada dukungan dari pembacanya.

Pertumbuhan ekonomi kaum Nahdliyin ini menghadapi berbagai kendala dari sistem Kolonial, yang telah mengkapling sektor ekonomi pada mitra Kolonialnya, yang mengakibatkan warga Nahdliyin mengalami hambatan untuk melakukan ekspor ke Jepang dan impor barang dari Jepang. Mukhtar NU di Menes Banten 1938 merekomendasikan kepada PBNU untuk mencoba meneroskos berbagai hambatan usaha berupa *licentie* dan *contingenteering* (izin untuk ekspor dan impor) kepada pemerintah Hindia Belanda.

Usaha ini juga perlu didukung dengan mendirikan firma dengan kapasitas lebih besar, tidak lagi dalam bentuk koperasi sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian bisa bekerjasama dengan pihak *importhandel* dan *exporthandel* yang mengatur seluruh sektor perdagangan luar negeri. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya pengembangan ekonomi rakyat sebagai tindak lanjut dari *economische mo-*

⁴ Lihat *Poatoesan Congres Ke 13 Nahdalatoel Oelama di Menes Banten, 1938.*

*bilisatie*⁴ yang digerakkan sebelumnya. Sebagai kelanjutannya dalam Mukhtamar Menes itu telah diusulkan untuk mendirikan Bank Islam, sebagai alternatif dari bank konvensional yang digerakkan dengan cara kapitalisme Belanda.

Di tengah gairah bisnis kaum santri, PBNU mengesahkan usul cabang Brebes dan Mister Cornelis (Jakarta) agar NU tidak mengutamakan *import luxe artikelen* (impor barang mewah), selanjutnya disarankan untuk mementingkan impor sarana pertanian. NU melakukan hubungan usaha dengan pihak luar sejauh belum mampu diproduksi oleh bangsa sendiri, ini sekadar untuk memancing kemajuan.⁵ Ini merupakan salah satu bentuk dari moral ekonomi santri, di mana sangat tegas orientasi usaha yang dilakukan, termasuk asketisme merupakan ciri utama ekonomi kaum ini.

Program yang diusulkan pada Mukhtamar NU di Menes 1938 itu kemudian dievaluasi dalam Mukhtamar Magelang 1939 walaupun banyak hambatan, tetapi telah berhasil dibentuk beberapa pusat industri, *tusschenhendel*, rukun tani Muslimin dan beberapa NV yang dikelola oleh NU dalam bentuk *syirkah*. Untuk mendorong gerakan ekonomi yang dicetuskan dalam Mukhtamar Menes itu, maka dalam Mukhtamar di Magelang delegasi dari Surabaya mengusulkan dilaksanakannya tiga *mabadi*, yaitu *mabadi*

khairo ummah, demikian istilah yang digunakan saat itu. Adapun sendi-sendi *mabadi* (dasar) itu adalah;

1. Benar (tidak doesta) ketjoeali jang diizinkan oleh Sjara' Islam.
2. Menepati djangdji.
3. Tolong-menolong teroetama dalam berdjoeal beli dan lain-lainnya oeroesan ECONOMIE.⁶

Usulan itu diterima baik oleh Mukhtamirin, karena jauh sebelumnya telah disosialisasikan di lingkungan Nahdliyin oleh Ketua PBNU K.H. Machfudz Siddiq (1937-1942) dan juga ulama yang lainnya. Dengan adanya landasan moral seperti itu terbukti cukup merangsang warga NU untuk melanjutkan usaha ekonomi mereka. Kehadiran *mabadi* penting sebagai pendorong pengembangan ekonomi sebagaimana dilaporkan bahwa;

“sekarang ini masanja menaboerkan benihnja dahoeloe jaitoe merataakan tiga mabadi, KHOIRO OEMMAH, atua lebih tegas masanja membangoenkan semangat oemmat ke arah perekonomian dan memoelai dari sedikit-sedikit tapi tentoe.⁷

Bahkan dijelaskan oleh K.H. Wahab Chasbullah bahwa cita-cita ekonomi sebagai bidang yang sangat penting untuk

⁵ Poetoesan Congres Ke 13 Nahdlatol Oelama di Menes Banten, 1938, h. 50-51.

⁶ Periksa Verslag-Congres Nahdlatol Oelama jang KLe-14 Magelang, 1939, h. 36

⁷ Verslag-Congres Nahdlatol Oelama jang KLe-14 Magelang, 1939, h. 52.

mengangkat kesejahteraan umat dan untuk pembiayaan organisasi itu sendiri, kemudian diusulkan untuk membangun armada sendiri untuk pengangkutan jama'ah haji.⁸

Dalam kondisi ekonomi yang cukup dinamis seperti itulah, Mukhtar NU merumuskan *mabadi khairo ummah*, sebuah pedoman pengembangan ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip dasar ini disosialisasikan oleh seluruh jajaran pengurus PBNU saat ketua Umumnya adalah K.H. Machfudz Shiddiq (1937-1942) hingga ke wilayah dan cabang. Prinsip itu tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan pengusaha, tetapi bagi seluruh warga, karena warga selalu terlibat dalam transaksi jual beli, sehingga prinsip tersebut bisa diterapkan oleh siapa saja. Walaupun prinsip semacam itu secara umum telah dikenal oleh kaum santri, sebagaimana selalu didiskusikan dalam pengajian kitab fiqh terutama dalam *bab buyu* (jual beli), namun *mabadi* ini sebuah penekanan baru sebagai penegas dari apa yang telah dipaparkan dalam kitab fiqh. Prinsip ini dirumuskan lebih operasional tidak bersifat akademik sebagaimana dalam kitab fiqh. Kunjungan K.H. Machfudz Siddiq ke Jepang tahun 1940, digunakan sebaik-baiknya untuk mempelajari perkembangan kebudayaan dan khususnya pengembangan ekonomi, untuk menumbuhkan perekonomian warga.

Perjuangan kemerdekaan melawan Belanda dan Jepang dengan sendirinya

menuntut kalangan NU untuk menyediakan amunisi dan logistik lebih besar. Apalagi dengan kepeloporannya dalam gerakan perjuangan *Sabilillah* dan *Hisbullah*, dana untuk perjuangan bersenjata yang sepenuhnya ditanggung sendiri oleh masyarakat dan pimpinan organisasi dan pesantren ini juga cukup tinggi. Semuanya ini mengandaikan adanya ketersediaan dana masyarakat yang besar yang bisa dihimpun oleh NU.

Kuatnya ekonomi kaum santri ini bisa dilihat dalam situasi yang sangat sulit. Ternyata kemampuan masyarakat melaksanakan ibadah haji, sampai masa perjuangan kemerdekaan ini masih cukup tinggi. Terbukti ketika Rois Akbar NU K.H. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa haram menjalankan ibadah haji pada masa perjuangan, karena menggunakan kapal Belanda, ribuan warga Nahdliyin membatalkan rencana hajinya dan menunda tahun berikutnya.

Peringatan itu penting sekali artinya bagi perjuangan kemerdekaan yang sedang dikobarkan bahwa dana untuk ibadah haji yang besar itu akan lebih besar. Artinya, kalau digunakan sebagai dana perjuangan, agar bangsa Indonesia bisa memperoleh kemerdekaan, sehingga bangsa Indonesia bisa memiliki kapal sendiri dan bisa menjalankan haji dengan kapal sendiri yang ongkosnya akan lebih murah. Selanjutnya juga semakin banyak umat Islam yang bisa melaksanakan ibadah haji. Larangan melaksanakan ibadah haji pada tahun itu bukanlah

⁸ Verslag-Congres Nahdlatoel Oelama jang KLe-14 Magelang, 1939, h. 52

bersifat *syar'i*, tapi sebuah strategi bersifat *iqtishadi* dan *siyasi* untuk mencapai Indonesia merdeka.

Dalam keadaan umat seperti itu, maka tidak aneh kalau Resolusi Jihad yang dideklarasikan K.H. Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 yang mewajibkan seluruh umat Islam untuk berjuang membela tanah air mendapat sambutan meriah. Seluruh umat Islam menyumbangkan tenaga dan hartanya untuk melakukan serangan pada 10 November 1945 di Surabaya, sehingga terjadi pertempuran heroik melawan tentara Sekutu, yang kemudian disebut dengan Hari Pahlawan. Semangat jihad yang berapi-api akibat seruan dari PBNU itulah rakyat mampu mengalahkan tentara Sekutu. Padahal tentara Sekutu dengan senjatanya yang mutakhir dan serba lengkap itu baru saja memenangkan perang Dunia Kedua dengan menaklukkan tentara Fasis, Jepang dan Jerman serta Italia. Ini tidak lain karena kekuatan semangat juang yang didukung amunisi dan logistik yang sangat kuat dari warga Nahdliyin sendiri.

Dalam Mukhtamar NU ke-16 tahun 1946 di Purwokerto, resolusi itu dipertegas kembali karena saat itu tanda-tanda agresi Belanda bersama Sekutu telah kelihatan. Tentu saja, pertempuran melawan penjajah ini membutuhkan kesiapan tenaga, tentara dan logistik yang memadai. Mengingat besarnya dana revolusi yang dibutuhkan oleh umat Islam untuk melanjutkan perjuangan,

maka pada tahun 1946, PBNU menaikkan tarif uang pangkal masuk organisasi, iuran bulanan maupun iuran tahunan. Pidato K.H. Hasyim Asy'ari yang berapi-api pada pembukaan muktamar, mengobarkan semangat jihad warga Nahdliyin dan umat Islam pada umumnya.⁹ Dana masyarakat yang dikumpulkan ini memiliki arti sangat penting bagi NU untuk menghadapi agresi Belanda saat itu dan tahun-tahun berikutnya. Sehingga ketika Belanda melakukan Agresi tahun 1947, pasukan Sabilillah yang digerakkan NU telah siap tempur menghadapi mereka sampai mampu duduk di meja perundingan.

Pengembangan Ekonomi Rakyat di Tengah Sistem Liberal

Dalam pengembangan ekonomi warga NU dan pengembangan ekonomi nasional setelah kemerdekaan, NU tetap menekankan prinsip-prinsip yang telah termaktub dalam *mabadi khaira ummah*. Ditambah dengan pengalaman pergumulan dengan ekonomi kapitalis yang digerakkan oleh rezim Kolonial, maka rumusan ekonomi NU semakin matang. Pemikiran ekonomi itu tidak hanya muncul dari kalangan ekonom NU, tetapi tidak kurang dari Ketua Umum PBNU K.H. Idham Cholid (1956-1984) juga salah satu penggerakannya. Sebagaimana dikatakan bahwa *moment actie dan gerakan mabadi khoiro ummah* yang digerakkan antara tahun 1938/1939 itu masih relevan dalam upaya menggerakkan

⁹Lihat Laporan Mukhtamar NU ke-16 tahun 1946 di Purwokerto, 1946.

ekonomi warga Nahdliyin. Kalau usaha pembangunan ekonomi pada zaman Kolonial banyak mendapat tekanan dari Belanda, maka sekarang ini telah bisa dijalankan secara bebas. Rois Aam yang juga saudagar juga merumuskan berbagai prinsip pengembangan ekonomi. Bagi Kiai Wahab, keamanan nasional merupakan prasyarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya penjajahan dan pemberontakan daerah seperti DI/TII dan PRRI Permesta, akan menyedot seluruh sumber daya ekonomi. Karena itu membangun kesejahteraan rakyat dan kemakmuran ekonominya harus dimulai dengan membangun keamanan. Dari situlah NU menolak segala bentuk pemberontakan.

Tahun 1950 politik Indonesia diwarnai dengan suasana liberal, hal itu juga mengarah pada sistem ekonomi liberal. Sementara semua pihak termasuk NU merasakan bahwa sistem ekonomi liberal yang mengandalkan persaingan bebas adalah sistem ekonomi kapitalis yang selama ini kebebasannya hanya dinikmati Kolonial dengan mitra Timur Asingnya, sementara ekonomi pribumi dibelenggu sehingga tidak bisa ikut bersaing karena tidak diberi kebebasan. Maka ketika demokrasi liberal ditetapkan, kalangan NU dan kaum nasionalis pada umumnya tetap menolak dilaksanakannya sistem ekonomi liberal. Sistem ini tidak memberi keuntungan pada rakyat, sebaliknya malah menghisab rakyat. Karena itu, NU mendukung sosialisme ala In-

donesia, yaitu sosialisme yang dilandasi oleh keadilan sosial dan berlandaskan pada akhlak dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sistem ini, banyak kalangan usaha NU yang hadir memberikan kontribusi besar pada jama'ah, seperti yang dilakukan para pengusaha tekstil di Majalaya Bandung yang umumnya warga Nahdliyin. Mereka menjadi donatur utama, sehingga Kiai Wahid Hasyim, Kiai Wahab secara rutin menemui mereka, untuk urusan bisnis dan sekaligus urusan gerakan.¹⁰

Dalam masalah orientasi dan kebijakan ekonomi nasional, NU mencoba membuat pertimbangan yang proporsional antara kepemilikan swasta dan negara. Dalam kaitan dengan ekonomi swasta ditegaskan bahwa dalam setiap masalah sosial politik, NU mengutamakan musyawarah dan tiap usaha (ekonomi) selalu mengutamakan gotong-royong. Dalam bidang ekonomi, hak milik pribadi selalu dihormati dengan jaminan agama yang telah menjadi adat istiadat asal kekayaan tersebut tidak diperoleh dan digunakan untuk memeras dan menindas. Hak milik bersama diakui sebagai sarana untuk menjamin kesejahteraan umum, yang dijalankan bersama secara *muawannah* (gotong royong). Berkaitan dengan ekonomi negara, NU berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai sebagian besar oleh pemerintah. Namun demikian, ekonomi negara masih perlu membuka pintu bagi kelompok swasta

¹⁰ Hasil wawancara lip D Yahya dengan para pengusaha Majalaya Bandung.

dalam prosentase tertentu. Peran ini hanya khusus diberikan kepada swasta nasional, yang terus-menerus berada di bawah bimbingan pemerintah agar apa yang diusahakan memiliki fungsi sosial.¹¹ Dalam hal ini, negara sangat diperlukan untuk selalu mengatur seluruh pengelolaan ekonomi nasional.

Di tengah sistem politik dan ekonomi liberal selama dasawarsa 1950-an, NU tetap pada pendiriannya pada sistem ekonomi yang nasionalistik dan populis. Kebijakan ekonomi NU yang populis dan nasionalistik itulah yang memungkinkan NU ditunjuk oleh presiden untuk menduduki posisi penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Terhitung ada tiga orang NU yang diserahi jabatan pada kementerian perekonomian, yaitu Mr Burhanuddin, Mr Sunardjo dan Rahmat Mulyomoseno.

Setelah itu beberapa tokoh NU juga diangkat sebagai Menteri Ekonomi. Ketika menjadi Menteri Perdagangan, Rahmat Mulyomoseno merumuskan kebijakan ekonomi perdagangan yang dituangkan dalam PP 10 yang melarang adanya pedagang eceran asing yang beroperasi sampai ke desa-desa. Kebijakan itu diperlukan untuk melindungi ekonomi rakyat dari cengkeraman dan monopoli modal besar. Sementara para pelaku ekonomi menengah dan kecil termasuk sebageaian besarnya adalah

warga NU.¹² Karena kebijakan atau ba-leid itu dirumuskan oleh para pimpinan NU, maka dalam pelaksanaannya PBNU mendukung penuh kebijakan ekonomi tersebut, sebagai realisasi dari gerakan ekonomi nasional yang berorientasi ke-rakoyatan.¹³

Dalam bidang ekonomi, NU memiliki kebijakan pokok yang dikeluarkan oleh muktamar, yaitu antara lain dengan berpedoman bahwa pembagian lapangan usaha harus ditetapkan dengan (a) *public utilities* dan cabang-cabang produksi dan distribusi yang vital dikuasai negara (b) lapangan yang disediakan dan dipegang oleh pengusaha swasta harus dipelihara dan disempurnakan (c) menggiatkan usaha koperasi sebagai pendorong kegiatan dan kehidupan ekonomi nasional. Dalam kesempatan itu diputuskan pula bahwa kegiatan ekonomi harus dikerahkan unuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan rakyat.

Mengenai modal asing, NU menetapkan sikap bahwa mendukung sepenuhnya politik pemerintah untuk melarang pedagang kecil bangsa asing yang ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI No. 10 1959. Pada saat yang sama, NU juga mengusulkan agar peraturan

¹¹ K.H. Idham Chalid, "Pidato Harlah NU Ke-34", dalam Buku Kenangan Muktamar NU ke-22, Jakarta 1959, h. 105.

¹² K.H. Idham Chalid, "Pidato Harlah NU ke-34", h. 147

¹³ K.H. Idham Chalid, "Pidato Harlah NU ke-34", h. 172. Sikap ini terungkap dalam jawaban KH Idham Cholid ketika ditanya oleh para Muktamirin dalam Muktamar NU.

pelaksanaan tentang penanaman modal asing segera disiapkan, termasuk mendesak agar segera menghapus hak *eigendon* dari hukum agraria, karena pemilikan tanah hanyalah dikhususkan bagi bangsa Indonesia.¹⁴

Mengingat desakan yang terus-menerus dari warga NU tentang perlunya PBNU merumuskan sistem ekonomi yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan bangsa, maka PBNU mendelegasikan kepada salah seorang pengurus PBNU yang menguasai bidang ini yaitu H. Zainal Arifin untuk membuat perumusan ekonomi NU yang kemudian dipresentasikannya secara lengkap dan komprehensif dalam Mukhtamar NU Ke-22 di Jakarta tahun 1959.¹⁵ Rumusan ekonomi berwawasan nasional dan berorientasi kerakyatan ini digunakan sebagai pegangan bagi warga Nahdliyin dalam menjalankan aktifitas ekonomi mereka.

Pada dasawarsa 1960-an, NU merupakan kekuatan penting dalam pemerintahan. Otomatis, pimpinan dan warga NU mendapatkan rembesan dari anggaran negara yang ada, baik dari gaji sebagai aparat pemerintah, maupun mendapatkan fasilitas atas kedudukan mereka. Kalau selama ini anggaran hanya dimanfaatkan oleh kalangan *ambtenaar* dan priyayi didikan Belanda, saat itu kalangan santri dan NU bisa turut menerima manfaat dari dana negara yang ada. Sebagai salah satu partai politik terbesar, NU

menduduki posisi penting dalam kancah politik nasional. Dengan sendirinya juga NU memiliki peran penting dalam kebijakan ekonomi nasional, apalagi masa itu masih terdapat kompetisi bebas, tanpa monopoli sehingga kalangan NU praktis bisa memasuki sektor bisnis.

Dengan adanya modal yang memadai, maka bisnis NU selama tahun 1960-an itu juga cukup berkembang. Tercatat hampir seluruh pimpinan NU yang memang sejak awal tidak berbasis pada pegawai negeri, tetapi berlatar belakang usaha dagang, ketika mendapatkan dana stimulus dari pemerintah, mereka mampu mengembangkan bisnisnya secara kreatif. Kiai Wahab saat itu memiliki beberapa perusahaan antara lain CV Karoernia yang cukup baik sehingga banyak mendapatkan tawaran modal dari Bank Indonesia. Sebagai pedagang yang berpengalaman, tentu tawaran semacam itu tidak diterima begitu saja, sebab mereka sangat tertib untuk menjaga rasio permodalan, antara modal pribadi dengan pinjaman. Maka usaha di lingkungan warga NU terus berkembang mulai dari koperasi, sektor perdagangan umum dan transportasi, termasuk bidang perfilman, sehingga semuanya bisa menggerakkan roda organisasi secara lebih dinamis. Demikian juga peran NU sebagai partai politik terbesar bisa semakin dibesarkan melalui kemampuan ekonominya yang cukup kuat. []

¹⁴ K.H. Idham Chalid, "Pidato Harlah NU ke-34", h. 180.

¹⁵ K.H. Idham Chalid, "Pidato Harlah NU ke-34", h. 81-90.